

ABSTRAK

PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA: KAITANNYA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Adiatma Nugroho (2310622045), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi
Bakhtiar.

Praperadilan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai mekanisme pengawasan legalitas tindakan penegak hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Dalam konteks tindak pidana korupsi, praperadilan sering digunakan sebagai celah formil untuk menggugurkan proses penyidikan, akibat belum adanya standar hukum yang tegas serta perbedaan tafsir hakim terhadap batas kewenangan, termasuk menyentuh aspek materiil yang bukan domain praperadilan. Penelitian ini mengkaji idealisasi praperadilan dengan pendekatan yuridis-normatif, berfokus pada asas *due process of law*, prioritas *lex specialis* Pasal 26A UU KPK, dan harmonisasinya dengan KUHP. Studi ini menemukan bahwa praperadilan seharusnya dibatasi sebagai *limited judicial review*, hanya menilai legalitas prosedural. Selain itu, pentingnya pembentukan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana dirancang dalam RUU KUHP turut disoroti. HPP dapat berfungsi sebagai pengawas aktif dan objektif terhadap tindakan penyidik sejak awal, sehingga mencegah pelanggaran HAM dan memperkecil potensi tersangka menggunakan celah praperadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pedoman yudisial dibutuhkan untuk menciptakan konsistensi putusan yang adil serta mendukung efektivitas pemberantasan korupsi.

Kata kunci: praperadilan, korupsi, due process.

ABSTRACT

The Future of Pretrial Proceedings in Indonesian Criminal Procedure: Its Relevance to Anti-Corruption Efforts

Adiatma Nugroho (2310622045), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi Bakhtiar.

*Pretrial proceedings play a strategic role in Indonesia's criminal justice system as a judicial oversight mechanism to ensure the legality of law enforcement actions and the protection of suspects' human rights. In corruption cases, however, pretrial motions are often exploited as procedural loopholes to invalidate ongoing investigations due to the absence of rigid legal standards and inconsistent interpretations by judges sometimes extending into the merits of the case, which should fall outside the scope of pretrial jurisdiction. This study examines the ideal concept of pretrial review using a normative juridical approach, emphasizing the due process of law principle, the primacy of *lex specialis* under Article 26A of the Anti-Corruption Law, and its harmonization with the Criminal Procedure Code (KUHAP). The research concludes that pretrial mechanisms should function solely as limited judicial review, restricted to evaluating procedural legality. Additionally, the study highlights the significance of establishing Preliminary Examination Judges (*Hakim Pemeriksa Pendahuluan*) as proposed in the Draft Criminal Procedure Code. These judges would proactively supervise investigative actions, ensuring procedural compliance and minimizing the misuse of pretrial remedies by corruption suspects. Strengthening normative frameworks and judicial guidelines is thus essential to foster coherent, fair rulings and support the integrity and effectiveness of anti-corruption law enforcement.*

Keywords : *pretrial, corruption, due process.*